



Article Informations
Corresponding Email:
050mayangsagara@gmail.com

Received: 28/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

PERBEDAAN PERLAKUAN PEMERINTAH POLANDIA TERHADAP PENGUNGSI UKRAINA DAN SURIAH: SEBUAH TINJAUAN KONSTRUKTIVISME

Mayang Sagara

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan perlakuan pemerintah Polandia terhadap pengungsi Ukraina dan Suriah dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena dimana Polandia menunjukkan solidaritas tinggi kepada pengungsi Ukraina sejak invasi Rusia tahun 2022, tetapi menolak kebijakan relokasi pengungsi Suriah pada krisis migrasi 2015 dengan alasan keamanan nasional, integrasi budaya, serta identitas Kristen-Eropa. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pengungsi tidak hanya ditentukan oleh faktor material seperti kapasitas ekonomi atau keamanan, tetapi juga oleh konstruksi sosial, narasi identitas, serta framing politik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa artikel akademik, laporan resmi, serta pemberitaan media Polandia. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola framing di media, persepsi masyarakat, dan sikap pejabat publik terhadap kedua kelompok pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi Ukraina dipersepsikan sebagai saudara dekat dengan kedekatan historis, budaya, dan agama yang serupa, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan legitimasi penuh dari pemerintah. Sebaliknya, pengungsi Suriah sering diposisikan dalam wacana negatif yang berkaitan dengan ancaman keamanan, perbedaan agama, serta potensi disrupsi terhadap identitas nasional Polandia.

Kata Kunci: Polandia, pengungsi Ukraina, pengungsi Suriah, konstruktivisme, framing, identitas nasional

ABSTRACT

This study examines the differences in the Polish government's treatment of Ukrainian and Syrian refugees through a constructivist approach. The research is grounded in the phenomenon where Poland has demonstrated strong solidarity with Ukrainian refugees since Russia's invasion in 2022, while rejecting the European Union's relocation policy for Syrian refugees during the 2015 migration crisis on the grounds of national security, cultural integration, and Christian-European identity. This contrast highlights that refugee policies are not solely determined by material factors such as economic capacity or security, but are also shaped by social constructions, identity narratives, and political framing. The study employs a descriptive qualitative method, utilizing secondary data from academic articles, official reports, and Polish media coverage. The analysis focuses on identifying framing patterns in the media, public perceptions, and the attitudes of policymakers toward both refugee groups. The findings indicate that Ukrainian refugees are largely perceived as close kin, sharing historical, cultural, and religious similarities, which has resulted in broad societal support and full governmental legitimacy. In contrast, Syrian refugees are frequently positioned within negative discourses related to security threats, religious differences, and potential disruption of Poland's national identity.

Keywords: Poland, Ukrainian refugees, Syrian refugees, constructivism, framing, national identity

1. PENDAHULUAN

Dalam kasus pengungsi Ukraina dan Suriah di Polandia, konstruktivisme menyoroti bagaimana identitas kelompok pengungsi dan narasi yang berkembang di masyarakat Polandia membentuk pola perlakuan yang berbeda. Misalnya, narasi solidaritas terhadap pengungsi Ukraina dibangun melalui kesamaan sejarah, budaya, dan kedekatan etnis yang dikonstruksi sebagai 'kami' yang berhak menerima bantuan dan perlindungan. Sebaliknya, pengungsi Suriah dikonstruksi sebagai 'lain' yang berbeda secara budaya dan agama, sehingga menghadapi penolakan dan diskriminasi. Media menjadi arena pertarungan narasi yang dapat memperkuat stereotip atau membuka ruang dialog dan penerimaan. Kebijakan pemerintah juga tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi identitas ini, yang akhirnya memengaruhi perlakuan terhadap pengungsi.

Sejak awal abad ke-21, dunia menghadapi gelombang krisis pengungsi yang terus meningkat, dipicu oleh konflik bersenjata, instabilitas politik, dan bencana kemanusiaan. Dua di antara krisis pengungsi terbesar dalam dekade terakhir adalah konflik di Suriah yang meletus sejak 2011, dan invasi

Rusia ke Ukraina pada 2022. Kedua konflik ini memicu eksodus massal jutaan warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara lain. Menurut data UNHCR, konflik Suriah telah menghasilkan lebih dari 6,8 juta pengungsi yang tersebar di berbagai negara, terutama di wilayah Timur Tengah dan Eropa. Sementara itu, sejak Februari 2022, invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan lebih dari 6 juta warga Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga terutama ke negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Rumania, dan Moldova. Kedua kelompok pengungsi ini sama-sama datang dari zona konflik, sama-sama kehilangan tempat tinggal, dan sama-sama mencari perlindungan dari ancaman kekerasan yang mengancam nyawa mereka.

Namun, meskipun latar belakang penderitaan yang mereka alami memiliki kesamaan mendasar, respons negara-negara penerima, terutama di kawasan Eropa Timur, menunjukkan perbedaan yang mencolok. Situasi ini membuka pertanyaan mendasar: mengapa pengungsi dari dua konflik yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda pula, bahkan oleh negara yang sama? Dalam konteks ini, Polandia menjadi salah satu contoh yang paling menonjol dalam memperlihatkan perbedaan perlakuan tersebut. Penanganan pengungsi di Polandia tidak terlepas dari kerangka kebijakan nasional dan regulasi yang terus berkembang sesuai dinamika politik dan sosial. Sejak krisis migrasi Eropa pada 2015, Polandia menerapkan kebijakan yang relatif ketat terhadap pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika, termasuk Suriah. Pemerintah Polandia lebih memilih pendekatan selektif dalam menerima pengungsi, dengan alasan keamanan dan perlindungan identitas nasional.

Proses integrasi pengungsi ke dalam masyarakat Polandia menghadirkan berbagai tantangan yang berbeda antara pengungsi Ukraina dan Suriah. Integrasi sosial, ekonomi, dan budaya memerlukan penyesuaian dua arah antara pengungsi dan masyarakat tuan rumah, namun perbedaan latar belakang budaya dan bahasa menjadi hambatan utama. Pengungsi Ukraina umumnya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan Polandia karena kedekatan budaya, bahasa, dan sejarah bersama. Hal ini

mempermudah mereka dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, serta membangun jaringan sosial yang kuat di komunitas lokal. Namun, tantangan tetap ada, seperti diskriminasi sporadis dan beban psikologis akibat trauma perang.

Sebaliknya, pengungsi Suriah menghadapi hambatan yang lebih kompleks. Perbedaan bahasa, agama, dan budaya menimbulkan kesulitan dalam komunikasi dan penerimaan sosial. Banyak pengungsi Suriah yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, akses pendidikan anak-anak yang terbatas, dan rasa keterasingan yang tinggi. Faktor ini memperlambat proses integrasi dan dapat menyebabkan isolasi sosial yang berkepanjangan. Selain itu, hambatan birokrasi dan kebijakan yang kurang responsif turut memperumit integrasi. Keterbatasan akses terhadap izin tinggal dan kerja bagi pengungsi Suriah mengakibatkan ketergantungan pada bantuan kemanusiaan dan menghambat kemandirian ekonomi mereka. Sementara pengungsi Ukraina memperoleh lebih banyak kemudahan akses yang mempercepat integrasi mereka. Pemahaman mendalam terhadap tantangan dan hambatan ini sangat penting agar kebijakan dan program integrasi dapat dirancang secara efektif dan inklusif, memperhatikan perbedaan kebutuhan dan kondisi kedua kelompok pengungsi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada diskursus kebijakan migrasi yang lebih inklusif dan adil, dengan mengidentifikasi faktor-faktor sosial-politik yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pengungsi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aktivis kemanusiaan, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang mampu mengatasi diskriminasi dan mempromosikan solidaritas universal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga relevansi praktis yang tinggi dalam konteks tantangan migrasi global dan penanganan krisis pengungsi di masa depan. Fokus pada Polandia sebagai studi kasus memberikan wawasan yang mendalam mengenai interaksi antara identitas nasional, konstruksi sosial, dan kebijakan migrasi di negara-negara Eropa Timur.

Dalam konteks ini, identitas pengungsi tidak dipandang sebagai kategori yang tetap dan objektif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses diskursif. Penelitian ini menentukan identitas kelompok pengungsi baik Ukraina maupun Suriah dengan menelaah bagaimana mereka direpresentasikan dalam wacana publik di Polandia. Representasi tersebut muncul melalui berbagai saluran, seperti pernyataan elite politik, kebijakan pemerintah, pemberitaan media lokal, hingga tanggapan dari masyarakat sipil. Dengan demikian, respons terhadap pengungsi dianalisis tidak hanya dari aspek kebijakan formal, tetapi juga dari konstruksi makna sosial yang dilekatkan pada masing-masing kelompok. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana identitas dan persepsi kolektif berperan dalam membentuk perlakuan yang berbeda terhadap pengungsi, sekaligus menegaskan pentingnya kajian terhadap diskursus domestik dalam melihat dinamika migrasi kontemporer.

2. PEMBAHASAN

Identitas nasional Polandia dibentuk dari beberapa hal penting, seperti agama Katolik, budaya khas Eropa Timur, pengalaman masa lalu di bawah pemerintahan komunis, dan sejarah penuh perjuangan yang meninggalkan trauma. Agama Katolik sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Polandia dan dianggap sebagai bagian penting dari siapa mereka. Tokoh seperti Paus Yohanes Paulus II bahkan menjadi simbol kekuatan moral bangsa saat melawan komunisme. Karena itu, agama ini bukan hanya menjadi kepercayaan, tapi juga identitas nasional yang sangat dijaga. Selain itu, masyarakat Polandia cenderung memandang dirinya dari sudut pandang budaya dan bahasa yang sama, atau yang biasa disebut dengan etnosentrisme. Mereka merasa identitas mereka erat kaitannya dengan warisan Eropa Timur dan sejarah panjang bersama. Karena sejarah penjajahan dan pembagian wilayah oleh negara besar seperti Rusia dan Jerman, muncul rasa nasionalisme yang defensif yaitu sikap protektif

terhadap segala sesuatu yang dianggap asing atau mengancam jati diri bangsa.

Agama Katolik memegang peranan penting dan utama sebagai simbol identitas dan persatuan nasional, yang membedakan Polandia dari negara-negara tetangga dengan mayoritas penduduk beragama Ortodoks atau Protestan. Kepercayaan dan nilai-nilai Katolik menjadi fondasi moral dan sosial yang memperkuat solidaritas internal masyarakat Polandia dan membentuk pandangan mereka terhadap yang lain di luar komunitas mereka. Selain itu, pola pikir etnosentris yang menekankan superioritas budaya dan warisan Eropa Timur menjadi elemen penting dalam membangun citra bangsa Polandia. Pandangan ini seringkali mengaitkan identitas nasional dengan kesamaan bahasa, budaya, dan sejarah yang dibagi bersama, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal seperti pengaruh Rusia dan komunisme.

Trauma geopolitik yang dialami Polandia seperti pembagian wilayah oleh kekuatan asing, pendudukan selama Perang Dunia II, dan pengalaman di bawah rezim komunis Soviet menjadikan kesadaran akan kedaulatan nasional dan perlunya menjaga kemurnian identitas sebagai hal yang sangat penting. Keseluruhan faktor ini turut membentuk persepsi pemerintah dan masyarakat Polandia terhadap pengungsi. Dalam konteks krisis pengungsi, identitas nasional yang kuat dan dilandasi oleh agama serta sejarah bersama tersebut membedakan cara pandang terhadap pengungsi Ukraina yang diposisikan sebagai saudara Slavia dan Katolik yang memiliki kedekatan budaya, dan pengungsi Suriah yang dianggap lebih asing secara budaya dan agama.

Dalam konstruksi identitas nasional Polandia, pengungsi Ukraina relatif lebih mudah masuk ke dalam lingkaran identitas karena kedekatan historis, geografis, dan kultural. Ukraina dan Polandia sama-sama merupakan negara Slavia, yang memiliki akar sejarah, etnisitas, dan bahkan pengalaman kolonial yang serupa terutama dalam hal hubungan yang tegang dengan Rusia. Banyak narasi publik dan media, pengungsi Ukraina diposisikan sebagai sesama korban dari agresi Rusia, musuh historis yang

juga meninggalkan luka dalam memori Polandia. Kedekatan ini membuat masyarakat Polandia lebih mudah berempati dan menerima kehadiran mereka, karena dianggap tidak terlalu asing. Sebaliknya, pengungsi Suriah sering kali ditempatkan di luar batas-batas identitas nasional yang dianggap kami. Perbedaan agama (Islam vs Katolik), budaya, dan bahasa membuat pengungsi Suriah dipandang sebagai orang luar yang tidak memiliki kesamaan mendasar dengan nilai-nilai Polandia.

Dalam konteks teori *imagined communities* Benedict Anderson, identitas nasional terbentuk dari konstruksi imajinatif bersama yakni bagaimana sekelompok orang membayangkan dirinya sebagai komunitas yang bersatu meskipun mereka tidak saling mengenal langsung. Sehingga di beberapa wacana politik dan media konservatif, pengungsi Muslim dianggap membawa ancaman terhadap stabilitas sosial dan nilai-nilai tradisional, seperti keamanan, moralitas, dan identitas keagamaan. Ketakutan ini tidak muncul semata-mata karena faktor ekonomi atau jumlah pengungsi, tetapi lebih karena mereka tidak cocok dengan imajinasi kolektif tentang siapa kita sebagai bangsa.

Dalam laporan oleh Open Society Foundations, ditemukan bahwa media Polandia sering menampilkan foto-foto pengungsi Suriah dengan fokus pada atribut yang menegaskan perbedaan visual, seperti jilbab, pakaian tradisional, dan ekspresi wajah yang digambarkan sebagai mengancam atau terasing. Narasi media semacam ini sangat berperan besar dalam membentuk identitas sosial dan memelihara garis pembeda antara kelompok dalam dan luar. Dengan membingkai pengungsi Suriah sebagai ancaman melalui bahasa dan visual tertentu, media memperkuat proses *othering* yang berdampak pada sikap publik dan kebijakan negara. Proses *othering* yang dilembagakan lewat media dan wacana sosial tidak hanya berhenti pada persepsi, tetapi juga berdampak nyata pada perlakuan institusional terhadap pengungsi Suriah di Polandia. Identitas mereka yang dikonstruksikan sebagai berbeda atau bahkan mengancam menghasilkan serangkaian konsekuensi praktis, mulai dari kebijakan negara hingga sikap masyarakat luas.

Pertama, dalam ranah kebijakan, pemerintah Polandia menunjukkan sikap yang sangat terbatas terhadap relokasi pengungsi dari Timur Tengah, khususnya Suriah. Polandia menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa yang secara terbuka menolak skema kuota pengungsi yang diajukan oleh UE pada tahun 2015. Pemerintah menyatakan alasan keamanan nasional, kekhawatiran terhadap radikalisme, serta kesulitan dalam integrasi budaya sebagai dasar penolakan. Meskipun ada tekanan dari institusi internasional, kebijakan Polandia tetap cenderung menutup diri terhadap pengungsi non-Eropa, yang memperkuat eksklusi sistematis terhadap kelompok seperti pengungsi Suriah.

Kedua, resistensi publik terhadap pengungsi Suriah juga menjadi konsekuensi nyata dari konstruksi identitas dan narasi media yang negatif. Survei opini publik menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Polandia merasa skeptis terhadap kemampuan pengungsi dari Timur Tengah untuk berintegrasi dan cenderung menolak keberadaan mereka di lingkungan lokal. Ketakutan akan perbedaan agama, budaya, dan nilai-nilai sosial menyebabkan munculnya reaksi-reaksi penolakan, baik dalam bentuk ujaran kebencian di media sosial maupun protes terhadap pembangunan tempat penampungan pengungsi.

Ketiga, dalam konteks integrasi sosial, pengungsi Suriah menghadapi hambatan yang jauh lebih kompleks dibandingkan pengungsi Ukraina. Tidak hanya karena perbedaan bahasa dan budaya yang lebih tajam, tetapi juga karena minimnya dukungan institusional dan sosial yang dapat membantu proses adaptasi mereka. Program-program integrasi seperti pelatihan bahasa, bantuan psikososial, atau peluang kerja formal sering kali tidak tersedia secara luas untuk pengungsi non-Eropa. Akibatnya, banyak pengungsi Suriah yang mengalami perbedaan berlapis sebagai imigran, sebagai Muslim, dan sebagai yang lain dalam masyarakat yang belum sepenuhnya siap menerima keberagaman.

Secara keseluruhan, proses *othering* terhadap pengungsi Suriah bukan hanya persoalan citra, tetapi telah bertransformasi menjadi sistem yang

berdampak nyata dalam kehidupan mereka. Dalam pendekatan konstruktivisme, hal ini menunjukkan bagaimana identitas sosial yang dikonstruksikan secara kolektif mampu membentuk perilaku negara dan masyarakat dalam memperlakukan kelompok luar, serta menciptakan ketimpangan yang terlembagakan. Temuan ini sejalan, sekaligus memperluas, argumen Becker (2024) yang menyoroti bagaimana pengungsi Suriah dan Ukraina *diframing* secara berbeda oleh media di Jerman dan Polandia. Becker menekankan bahwa narasi media sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik terhadap pengungsi, terutama dengan membingkai pengungsi Ukraina sebagai korban yang dekat secara budaya, dan pengungsi Suriah sebagai yang lain, yang asing dan berpotensi mengancam.

Pengungsi Ukraina dimaknai sebagai keluarga dekat, sebagai bangsa yang memiliki kedekatan budaya dan sejarah, serta dipersepsikan sebagai korban dari musuh bersama: Rusia. Hal ini membangkitkan memori Polandia terhadap sejarah penjajahan dan penindasan Soviet, sehingga menciptakan solidaritas emosional yang kuat. Sebaliknya, pengungsi Suriah sering kali dikonstruksikan dalam narasi sebagai yang lain, asing, muslim, dari Timur Tengah, dan bahkan potensial menimbulkan ancaman terhadap nilai-nilai budaya Kristen Eropa. Meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil, persepsi ancaman terhadap mereka justru lebih besar. Ini membuktikan bahwa ancaman bukan fakta objektif, tetapi hasil dari konstruksi makna sosial dan identitas yang dilekatkan kepada sebuah kelompok.

Dengan pendekatan konstruktivisme dapat dipahami bahwa diskriminasi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja dari kebijakan formal atau sikap individu semata. Sebaliknya, diskriminasi merupakan hasil dari proses sosial yang panjang, di mana identitas kolektif, narasi dominan, dan memori sejarah berinteraksi dan membentuk persepsi terhadap kelompok tertentu. Dalam kasus Polandia, penerimaan terhadap pengungsi Ukraina dan penolakan terhadap pengungsi Suriah tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan yang sudah terlihat seperti kapasitas negara atau keamanan. Perbedaan perlakuan tersebut justru mencerminkan bagaimana

identitas nasional Polandia yang kuat sebagai negara Katolik, anti-komunis, dan berakar Eropa Timur, membentuk batas-batas simbolik antara kita dan mereka.

Sejarah sosial Polandia termasuk trauma kolektif terhadap pendudukan Soviet dan pengalaman sebagai korban perang berperan besar dalam membentuk solidaritas terhadap Ukraina. Namun, sejarah ini tidak memberi ruang empati yang sama kepada kelompok seperti pengungsi Suriah, yang dianggap berada di luar narasi historis nasional Polandia. Dengan demikian, diskriminasi dalam perlakuan terhadap pengungsi di Polandia merupakan manifestasi dari konstruksi sosial yang kompleks, bukan hanya soal keputusan kebijakan yang terpisah. Konstruktivisme menunjukkan bahwa apa yang dianggap layak diterima atau berbahaya sangat bergantung pada makna sosial yang dibangun melalui identitas dan sejarah.

Ketimpangan perlakuan terhadap pengungsi Ukraina dan Suriah tidak hanya berdampak pada pengalaman individual kedua kelompok tersebut, tetapi juga menciptakan risiko jangka panjang berupa normalisasi diskriminasi dalam kerangka kebijakan imigrasi Polandia. Ketika perbedaan latar belakang etnis, agama, atau kedekatan historis-budaya dijadikan dasar pembeda antara siapa yang layak diberi perlindungan dan siapa yang tidak, maka negara secara tidak langsung sedang membentuk hierarki kemanusiaan. Dalam hal ini, pengungsi Ukraina sering kali digambarkan sebagai tetangga atau keluarga yang sedang kesusahan, sementara pengungsi dari Timur Tengah seperti Suriah kerap mendapat stigma sebagai ancaman, bahkan sebelum proses penilaian individual dilakukan.

Hal ini memperlihatkan adanya konstruksi sosial dan politik yang secara sistematis memperkuat narasi eksklusivitas dan bisa mengarah pada diskriminasi yang dilembagakan. Jika perlakuan ini dibiarkan, praktik diskriminatif tersebut dapat menjadi norma dalam kebijakan imigrasi di mana negara hanya responsif terhadap krisis kemanusiaan ketika korbannya memiliki kesamaan ras, agama, atau identitas geopolitik tertentu. Risiko ini

tidak hanya mencederai nilai-nilai etis dan moral universal, tetapi juga melemahkan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam hukum internasional. Misalnya, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi secara eksplisit menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan tanpa memandang kebangsaan atau asal-usul etnis. Lebih jauh, normalisasi ini juga menciptakan hal yang berbahaya dalam diskursus publik. Masyarakat yang menyaksikan bagaimana negara memperlakukan satu kelompok pengungsi dengan empati dan kelompok lain dengan penolakan secara tidak langsung diajarkan bahwa diskriminasi adalah hal yang dapat diterima.

Dalam jangka panjang, ini dapat memperparah polarisasi sosial, memperkuat stereotip, dan melemahkan ketertarikan sosial yang dibutuhkan untuk masyarakat yang beragam. Polandia, sebagai negara anggota Uni Eropa, memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari integrasi Eropa, termasuk solidaritas, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, diskriminasi yang dilembagakan tidak bisa dilihat sebagai kebijakan praktis jangka pendek, melainkan sebagai ancaman struktural yang bisa mengubah arah politik kemanusiaan suatu negara. Mengabaikan ketimpangan ini bukan hanya soal pengabaian terhadap pengungsi Suriah, tetapi juga pembiaran terhadap pengikisan nilai-nilai kemanusiaan dalam tatanan negara yang demokratis

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan antara pengungsi Ukraina dan Suriah di Polandia sangat dipengaruhi oleh bagaimana identitas nasional Polandia yang dikonstruksikan dan bagaimana proses *othering* bekerja dalam masyarakat serta media. Identitas nasional Polandia yang sangat menekankan pada nilai-nilai Katolik, warisan budaya Eropa Timur, serta pengalaman sejarah melawan komunisme dan invasi asing, membuat pengungsi Ukraina diposisikan sebagai keluarga dekat yang berbagi latar

belakang sejarah dan budaya yang serupa. Hal ini tercermin dalam narasi solidaritas yang kuat dan kebijakan pemerintah yang lebih ramah terhadap mereka.

Sebaliknya, pengungsi Suriah yang memiliki latar belakang agama Islam, budaya Timur Tengah, dan bahasa yang berbeda diposisikan sebagai “yang lain” (*the other*). Proses *othering* ini diperkuat oleh framing media Polandia yang sering menampilkan pengungsi Suriah dengan stereotip negatif, seperti ancaman keamanan, perbedaan budaya, dan ketidakmampuan berintegrasi. Media berperan besar dalam membentuk persepsi publik yang cenderung skeptis dan kurang menerima pengungsi Suriah, sehingga memperkuat jarak sosial dan diskriminasi terhadap mereka.

Konstruksi identitas sosial ini bukan hanya menjadi faktor simbolik, tapi juga berimplikasi nyata dalam kebijakan pemerintah Polandia. Pengungsi Ukraina mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap hak tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja, sementara pengungsi Suriah menghadapi prosedur yang kompleks dan banyak hambatan birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa identitas nasional dan framing media dapat secara langsung mempengaruhi pembentukan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penelitian ini menegaskan bahwa identitas sosial yang dikonstruksi secara kolektif bukanlah hal yang statis atau netral, melainkan aktif membentuk perilaku negara dan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan perlakuan ini bukan hanya masalah administratif, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara identitas, narasi, dan sejarah sosial yang memproduksi diskriminasi institusional.

Secara keseluruhan, temuan ini mengajak kita untuk refleksi kritis terhadap bagaimana identitas nasional dan narasi media dapat menciptakan batas-batas sosial yang eksklusif dan berdampak pada keadilan dalam perlindungan pengungsi. Untuk itu, kebijakan kemanusiaan harus didasarkan pada prinsip universalitas dan nondiskriminasi, agar perlakuan

terhadap pengungsi tidak lagi bergantung pada konstruksi identitas yang membatasi solidaritas dan keadilan sosial.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Revised ed.). Verso.

Baron, R. A., & Byrne, D. (2003). *Social psychology* (10th ed.). Allyn & Bacon.

BBC Indonesia. (2022, 6 Maret). Jumlah pengungsi Ukraina capai 1,5 juta, 'Situasi di sana menyedihkan...' BBC News Indonesia.

BBC News. (2011). Syria conflict: from peaceful protest to civil war.

Beata Szydło [Prime Minister]. (2016, March). Poland abandons promise to take in refugees after Brussels attacks. DW. <https://www.dw.com/en/poland-abandons-promise-to-take-in-refugees-after-brussels-attacks/a-19137258>

Becker, S. (2024). Why do states discriminate between refugee groups? Understanding how Syrian and Ukrainian refugees were framed in Germany and Poland. *American Journal of Cultural Sociology*.

Berger, A. A. (2012). *Media analysis techniques* (4th ed.). SAGE Publications.

Błaszczak, M. [Justice Minister]. (2017, May). Poland defies EU over asylum seekers. Euractiv with Reuters. <https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/poland-defies-eu-over-asylum-seekers/>

Brücker, H., & Kogan, I. (2024). Perceived loneliness: Why Syrian refugees are more lonely than newly arrived migrants in Germany. *Comparative Migration Studies*, 12, 15–32.

CBOS. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców [Sikap Orang Polandia terhadap penerimaan pengungsi], July 2016.
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_101_16.PDF

Centre for East European and International Studies (ZOiS). (2019). The European refugee crisis and refugee protection in Poland. ZOiS Spotlight.

Checkel, J. T. (2001). Why comply? Social learning and European identity change. *International Organization*, 55(3), 553–588.

Cianciara, A. K. (2018). The securitization of the European migration crisis in Polish public discourse. *Przegląd Europejski*, 3(49), 52–65.
<https://doi.org/10.31338/1641-2478pe.3.18.4>

Consilium. (2024, June 25). Ukrainian refugees: Council extends temporary protection until March 2026. Retrieved from
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/25/ukrainian-refugees-council-extends-temporary-protection-until-march-2026/>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. Allen & Unwin.

Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.

Die Zeit. (2016). Germany is strong and helpful. But more refugees mean more conflicts. We have to prepare ourselves for it. Retrieved August 8, 2025, from
<https://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/refugees-open-border-policy-september-2015-angela-merkel/komplettansicht>

Directorate-General for Migration and Home Affairs Andryszczyk, J. (2019). “Us” and “Them” in the language of conservative islamophobia: referential and

predicational strategies in Polish right-wing press discourse on the migration crisis in 2015. *Studia Humanistyczne AGH*, 18(1), 33–52.

Doty, R. L. (1996). *Imperial encounters: The politics of representation in North-South relations*. University of Minnesota Press.

Drewski, D., & Gerhards, J. (2023). Why do states discriminate between refugee groups? Understanding how Syrian and Ukrainian refugees were framed in Germany and Poland. Migration Policy Centre. Scholten,

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.

EU Commission European Council on Refugees and Exiles. (2022). Asylum Information Database (AIDA) – Country report: Poland. Retrieved from <https://asylumineurope.org/reports/country/poland/>

European Commission UNHCR. (2018). *Desperate journeys: Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders*.

European Commission. (2023). Support for Ukrainian refugees in the EU. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_en

European Commission. (2024, July 23). Poland: Government launches initiative promoting the independence of those displaced from Ukraine.

European Commission. European Council on Refugees and Exiles (ECRE). (2022). *Integration policies for refugees in Poland: Challenges and opportunities*.

European Council on Refugees and Exiles. (2023). Asylum Information Database (AIDA) – Country Report: Poland. Retrieved from <https://asylumineurope.org/reports/country/poland/>

European Migration Network. (2018). Annual Report on Migration and Asylum 2017: Poland.

European Migration Network. (2019). Annual Report on Migration and Asylum 2018: Poland.

European Union Agency for Fundamental Rights. Integration of migrants: Provision of support services. Vienna: FRA, 2020.
<https://fra.europa.eu/en/publication/2020/integration-migrants-support-services>

Fekete, L. (2018). Europe's fault lines: Racism and the rise of the right. Verso.

Fidriansyah, M. A. (2021). Analisis perbedaan sikap Polandia terhadap Middle East and Ukraine refugees through constructivism [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta].
<https://repository.upnvj.ac.id/36008/>

Friedman, E. (2024). Refugees or Migrants: Polish Reception to Ukrainian and Syrian Refugee Crises (2015/2022). Senior Thesis, Fordham University.
Retrieved from
https://research.library.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1143&context=international_senior